

DAFTAR PUSTAKA

- Syukuri, M., Hinaya. 2019. Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, “Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Anggaran Belanja Modal Kabupaten&Kota Provinsi Sulawesi Selatan” dalam JEMMA : Jurnal Of Economic, Management and Accounting Volume 2 Nomor 2. Sulawesi Selatan. *E-jurnal Fakultas Ekonomi Universitas Andi Djemma*.
- Susanti, S., Fahlevi, H. 2016. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Dana Bagi Hasil Terhadap Belanja Modal (Studi Pada Kabupaten/Kota di Wilayah Aceh). Volume 1 Nomor 1 Halaman 183-191. Aceh. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi (JIMEKA)*
- Fahmi, M., Hairani. 2019. Pengaruh PAD dan DAU Terhadap Belanja Modal Pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Sumatera Selatan. Vol. 16 No. 1. *Jurnal Media Wahana Ekonomika*.
- Retno, N, D., Widiatmoko, J. 2019. “PAD, DAU, DAK, DBH, Luas Wilayah Terhadap Belanja Modal dan Dampaknya Pada Pertumbuhan Ekonomi (Studi pada Provinsi/Wilayah Sumatera, Jawa, dan Bali Tahun 2012-2017)” dalam Dinamika Akuntansi, Keuangan dan Perbankan, Vol. 8, No. 1, Hal: 24-36. Semarang. *Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Stikubank Semarang, Indonesia*.
- Pariani, E., Fadrul. 2018. “Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum Terhadap Belanja Modal Pada Kabupaten/Kota di Provinsi Riau” dalam BILANCIA Vol. 2 No. 2. Pekanbaru. *Program Studi S1 Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Pelita Indonesia*.
- Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, 2017, Laporan Realisasi Anggaran. www.djpk.depkeu.go.id.
- Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, 2018, Laporan Realisasi Anggaran. www.djpk.depkeu.go.id.
- Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, 2019, Laporan Realisasi Anggaran. www.djpk.depkeu.go.id.
- UU RI. 2004. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah*.
- UU RI. 2004. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah*.
- UU RI. 1999. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah*

UU RI. 2005. *Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah*